BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional (Perwita & Yani, 2005: 4).

Studi Hubungan Internasional sebenarnya merupakan sebuah kajian yang telah lama ada, bahwa perkembangan dalam sebuah bidang studi berkaitan erat dengan perkembangan dalam bidang-bidang studi lain (Sonderman Fred: 13).

Dalam perjalanannya ilmu Hubungan Internasional terus mengalami perkembangan yang pesat, Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mempelajari hubungan antar negar-negara yang berdaulat telah mengalami pergeseran, dimana muncul aktor-aktor lain dalam ilmu Hubungan Internasional yang juga mempunyai peranan penting seperti *nonstate actor*. Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mengkaji peperangan dan perdamaian kemudian memperluas bentuk kajiannya yaitu untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan juga kesinambungan yang berlangsung dalam hubunganantar negar

atau antarbangsa dalam konteks sistem global, menjadi kajian Hubungan Internasional yang tidak hanya fokus pada hubungan politik yang berlangsung antar negara, tapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara, inilah kemudian yang disebut dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003 : 51).

Menurut Robert Jackson & George Sorenson dalam buku *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, mengemukakan bahwa :

> "Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (Jackson, 2005:3).

Tujuan utama dari Hubungan Internasional yaitu mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku aktor negara maupun non-negara di dalam arena transaksi internasional, dimana perilaku tersebut bisa berupa kerjasama, aliansi, perang, dan sebagainya. Terdapat beberapa tujuan dasar dalam mempelajari ilmu Hubungan Internasional seperti dikemukakan Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani yaitu :

> "Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara maupun non-negara di dalam arena transaksi internasional, dimana perilaku tersebut bisa berupa kerjasama, pembentukan, aliansi, perang, konflik serta interaksi didalam organisasi internasional" (Perwita & Yani, 2005 : 4-5).

2.1.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Perwita & Yani, 2005:7).

Menurut Rosenau dalam Yani pad kajian Politik Luar Negeri menyatakan Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan Eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan Politik Luar Negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan Eksternal maupun Internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya (Rosenau dalam Yani, 2010:3).

Dalam tulisannya Breuning menyebutkan signifikansi dan tujuan dari pembelajaran politik luar negeri. Tujuan dari mempelajari politik luar negeri adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diaplikasikan secara umum tentang bagaimana kebijakan luar negeri dibuat, mengapa para pemimpin membuat kebijakan tertentu, mengapa negara terlibat dalam perilaku politik luar negeri tertentu, serta memprediksi peluang dan batasan dalam sistem internasional (Breuning, 2007:17).

Studi politik luar negeri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu tergantung pada konteks internasional yang terjadi. Pada awalnya, studi politik luar negeri memiliki fokus utama pada upaya untuk memelihara dan meningkatkan

kekuatan dan keamanan suatu negara. Namun setelah Perang Dingin berakhir, adanya fenomena globalisasi menjadikan keterikatan ekonomi dunia meningkat. Kondisi ini mempengaruhi negara dalam merumuskan agenda politik luar negerinya. Dewasa ini, politik luar negeri tidak hanya meliputi isu-isu keamanan dan ekonomi saja, namun telah berkembang pada isu-isu *low politics*, seperti lingkungan, hak asasi manusia, pertumbuhan penduduk dan migrasi, hingga isu pangan dan energi (Breuning,2007:5).

Selain karena isu-isu Internasional yang semakin kompleks, perkembangan studi politik luar negeri terjadi karena munculnya aktor-aktor baru yang terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pada awalnya, investigasi kebijakan luar negeri melihat pada negara dan pemimpinnya, namun sekarang telah berkembang pada diplomasi publik atau usaha diplomasi pemerintah dengan target masyarakat, pers, dan aktor-aktor lain selain negara (Breuning,2007:6).

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah salah satu bidang kajian Hubungan Internasional dan kebijakan luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Dalam kajian kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi *output*. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu Negara.

Kebijakan luar negeri adalah aksi dari suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya yang diformulasikan dari kepentingan internasional, kapabilitas, pembuat kebijakan, kebutuhan, dan aspirasi dari masyarkat (Holsti dalam Jervis 2005 : 19). Dalam mempelajari kebijakan luar negeri pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu kebijakan luar negeri itu pada dasarnya adalah *"action theory"* atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.

Tindakan-tindakan eksternal negara tertuang dalam kebijakan luar negerinya meliputi berbagai macam jenis dan bentuk. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan mengkonsepkan bentuk dan jenis tindakan eksternal pada suatu negara. Rossenau dalam Perwita dan Yani mengkonsepkan kebijakan luat negeri dalam tiga konsep, dimana satu sama lain saling terkait, yaitu :

1. Kebijakan luar negeri dalam pengertian seperangkat orientasi (*a cluster of orientation*), yaitu yang berisikan seperangkat nilai-nilai ideal kebijakan luar negeri suatu negara yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan. Orientasi ini merupakan hasil dari pengalaman sejarah dan persepsi masyarakat terhadap letak strategis negaranya dalam politik dunia.
2. Kebijkan luar negeri dalam pengertian strategi atau rencana komitmen untuk bertindak (*as set of commitment and plans for action*), yang berisikan cara-cara dan sarana-sarana yang dianggap mampu menjawab hambatan

dan tantangan dari lingkungan eksternalnya. Strategi suatu negara ini didasari dari orientasi kebijkan luar negerinya, sebagai hasil interpretasi elit terhadap orientasi kebijkan luar negerinya dalam menghadapi berbagai situasi spesifik yang membutuhkan suatu strategi untuk menghadapi situasi tersebut.

3. Kebijkan luar negeri dalam pengertian bentuk perilaku (*as a form of behavior*), merupakan fase paling empiris dalam kebijkan luar negeri. Konsep ketiga ini merupakan langkah-langkah nyata yang diambil para pembuat keputusan dalam merespon kejadian dan situasi eksternal yang merupakan tranlasi dari orientasi dan artikulasi dari sasaran dan komitmen tertentu. Perilaku ini berbentuk baik tindakan-tindakan yang dilakukan maupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pemerintah. Perilaku kebijkan luar negeri merupakan implementasi strategi kebijkan luar negeri suatu negara dalam situasi tertentu (Perwita & Yani, 2005 : 53-55).

Modelski dalam Dugis 2007 mengutarakan pendapatnya dalam menggambarkan Kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem kegiatan. Dengan perspektif ini, Kebijakan luar negeri dipandang sebagai suatu sistem di mana keputusan Kebijakan luar negeri dirumuskan dan direncanakan untuk dieksekusi Selain itu, Modelski dalam Dugis 2007 mencatat bahwa kebijakan tentu dirumuskan di bawah bimbingan prinsip-prinsip tertentu dan harus dibuat dengan tujuan tertentu.

Konsep dasar dalam kebijakan luar negeri, adalah :

1. Pembuat kebijakan
2. Tujuan
3. Prinsip
4. Kekuasaan untuk melaksanakan
5. Konteks di mana kebijakan luar negeri dirumuskan (Dugis, 2007: 2).

Breuning (2007) dalam tulisannya yang berjudul *Foreign Policy Analysis A Comparative Introduction* menyebutkan bahwa terdapat tiga hal penting untuk memahami kebijakan luar negeri secara utuh, karena kebijakan luar negeri tidak bisa hanya dinilai dari satu sudut pandang saja. Ketiga hal tersebut adalah *individual level analysis, state level analysis*, dan *system level analysis*. Dengan memahami ketiga bagian ini kita akan mampu memahami hubungan komparasi dalam segi pembuatan keputusan, perilaku kebijakan luar negeri, dan interaksi antar negara. Bagian inilah yang dikenal sebagai *comparative methods*. Metode ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan mengenai pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri dan untuk merespon dengan tepat terkait dengan tindakan aktor lain. Tujuan utama dilakukannya perbandingan kebijakan luar negeri adalah untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang bagaimana kebijakan luar negeri dibuat, mengapa pemimpin membuat keputusan tersebut, mengapa negara terlibat dalam perilaku kebijakan luar negeri tertentu, serta untuk menilai peluang dan kendala didalam sistem internasional (Breuning, 2007: 11–17).

Menurut Jack C. Plano dalam kamus Hubungan Internasional menerangkan mengenai kebijakan luar negeri (*foreign policy*) yaitu:

> "Strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikembalikan untuk mencapai tujuan nasional yang khusus" (Plano, 2000:47).

Selain itu Plano mengatakan bahwa ada beberapa langkah yang ditempuh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu :

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan sasaran yang spesifik. Menetapkan faktor-faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri.
2. Menganalisis kapabilitas nasional untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
3. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan.
4. Melaksanakan tindakan yang dianggap perlu.
5. Secara periodik meninjau dam melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan hasil yang dikehendaki (2000 : 48).

Dalam melakukan kebijakan luar negeri suatu negara dihadapkan pada pilihan-pilihan mengenai instrumen yang akan digunakan. Holsti membagi instrumen kebijakan luar negeri menjadi lima, yaitu: diplomasi, propaganda, ekonomi, intervensi, dan tindakan militer terselubung, dan persenjataan, perang dan pengaruh politik (Holsti, 2006 : 9).

Kajian mengenai teori proses pembuatan keputusan luar negeri menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan nasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternatif yang ada, dengan keuntungan yang sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan dan semua sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan (Mas'oed, 2000 : 276).

Dalam melakukan kebijakan luar negeri suatu negara dihadapkan pada pilihan-pilihan mengenai instrumen yang akan digunakan. Holsti membagi instrumen kebijakan luar negeri menjadi lima, yaitu: diplomasi, propaganda, ekonomi, intervensi, dan tindakan militer terselubung, dan persenjataan, perang dan pengaruh politik (Holsti, dalam Jervis 2005).

Rosenau dalam Yani Kebijakan Luar Negeri ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa lingkungan eksternalnya (Rosenau dalam Yani,2010:4).

Menurut Holsti dalam Yani, Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup:

a. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
b. Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
c. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
d. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
e. Melaksanakan tindakan yang diperlukan (Rosenau dalam Yani, 2010:4).

Tujuan dari kebijakan luar negeri menurut Rosenau dalam jurnal Yanyan Mochamamad Yani sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dimana aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan suatu negara (Rosenau dalam Yani, 2010:5).

Rosenau dalam Mochammad Yani juga mengutarakan Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*). Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan

untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Rencana tindakan ini termasuk tujuan yangspesisfik serta alat atau cara untuk mencapainya yang dianggap cukup memadai untuk menjawab peluang dan tantangan dari luar negeri. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*). Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternal. Langkah-langkah tersebut dilakukan berdasarkan orientasi umum yang dianut serta dikembangkan berdasarkan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik, jadi kebijakan luar negeri dapat dibedakan sebagai sekumpulan orientasi, sekumpulan komitment dan rencana aksi, dan sebagai suatu bentuk perilaku. Setiap negara menghubungkan negaranya kepada peristiwa dan situasi di luar negara (Rosenau dalam Yani, 2010 : 7-8).

Sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri menurut Rosenau dalam Yani , yaitu:

Sistemik (*systemis sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan di antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk diantara negara-negara dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis. Yang dimaksud dengan struktur hubungan antara negara besar adalah jumlah negara besar yang ikut andil dalam struktur hubungan internasional danm bagaimana

pembagian kapabilitas di antara mereka. Sementara faktor situasional eksternal merupakan stimulan tiba-tiba yang berasal dari situasi internasional terakhir.

Sumber masyarakat (*societal sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik. Kebudayaan dan sejarah mencakup nilai, norma, tradisi, dan pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan antara anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan sendiri. Hal ini dapat mendasari kepentingan negara tersebut untuk berhubungan dengan negara lain.

Sumber pemerintahan (*governmental sources*), merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Pertanggungjawaban politik seperti pemilu, kompetisi partai dan tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi eksternal. Sementara dari struktur kepemimpinan dari berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam pemerintahan.

Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*), merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Disini tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai.

Selain keempat sumber kebijakan luar negeri di atas, terdapat pula hirauan akan faktor ukuran wilayah negara dan ukuran jumlah penduduk, lokasi geografi, serta teknologi yang dapat terletak pada sumber sistemik atau masyarakat. Dengan

banyaknya faktor yang beraneka ragam, Rosenau menyarankan untuk melakukan *cluster of input*, dimana penstudi kebijakan luar negeri dapat memilih dan menggabungkan faktor mana yang paling penting dan patut diberi perhatian dalam menjelaskan politik luar negeri suatu negara yang diteliti (Rosenau dalam Yani, 2010:11-12).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintah, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami prilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan prilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara dan bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2002 : 116).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau state beerperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selalnjutnya di dalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep '*power*' kepentingan '*interest*' didefinisikan ke dalam terminologi power (Sitepu, 2011 : 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi ekonomi-politik, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu '*power'* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapt pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahas sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan prilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011 : 163).

Setiap negara mereflesikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapaiannya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasionalnya.

2.1.5 Keamanan Internasional

Defenisi yang paling sering di gunakan oleh penstudi HI adalah defenisi dari Barrry Buzan yang dalam bukunya *People State and Fear* mengatakan bahwa :

> "Keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu kemanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit kemanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda" (Buzan dalam Perwita & Yani, 2005:122)

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional

telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun definisi keamanan dewasa ini meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya. Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi 26 diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (*inter-state relations*), tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat dan memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu hal yang membahayakan eksistensi dan mengganggu kesejahteraan hidup bangsa dan negara, maka hal tersebut akan dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap masalah keamanan nasional negara tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Yahya A. Muhaimin, yaitu:

> "Bahwa pembinaan pertahanan negara dapat dilakukan denga konsep Preventive defense yakni strategi pertahanan yang mengonsentrasikan keamanan nasional pada berbagai macam potensi ancaman, meskipun ancaman tersebut bersifat kecil, namun jika tidak dikelola secara tepat maka ancaman tersebut akan menjadi bahaya yang konkrit, yang secara langsung akan mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara" (Muhaimin, 2006:23).

Sementara itu, menurut Simon Dalby, dimensi keamanan dalam studi Hubungan Internasional telah mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif nontradisional yang lebih mengedepankan *human security* dan mengandung lebih banyak aspek. Keamanan tidak lagi terfokus pada *interstate relation,* tetapi juga pada keamanan untuk masyarakat (Dalby, 2003:102-103).

Konsep keamanan merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji hubungan internasional yang lebih baik, mendalah dan berguna dibanding dengan konsep kekuatan dan perdamaian. Konsep kemanan ini dapat dilihat sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrem antara kekuatan dan perdamaian. Analisis kemanan memerlukan suatu cara pandang yang menempatkan negara dan sistem ke dalam sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dimana negara sebagian terbentuk dengan sendirinya dan sebagian lain dibentuk oleh lingkungan anarki yang kompetitif dan sengit. Lingkungan domestik dinamika Internasional, keduanya merupakan hal yang paling penting bagi analisis keamanan karena merupakan hubungan yang kompleks di antara keduanya.

Meskipun terdapat tiga tingkatan keamanan dalam problem manusia yaitu: keamanan individu, kemanan nasional, dan keamanan internasional, namun pada dasarnya konsep inti dari ketiga tingkatan tersebut adalah keamanan nasional. Hal ini dikarenakan negara merupakan titik sentral yang mendominasi regulasi hubungan maunpun kondisi keamanan di antara kedua level lainnya.

Menurut Barry Buzan dalam Perwita dan Yani *People State and fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era,* bahwa keamanan yang di maksud di dalam pendekatan ini tidak sebatas pada keamanan saja, tetapi mencakup keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, seperti yang di paparkan di bawah ini:

1. Keamanan militer, mencakuo interaksi antar dua tingkat dan kekuatan yaitu kemampuan defensif dan persepi militer mengenai intensi masing-masing pihak
2. Kemanan politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu negara atau sistem pemerintahan serta ideologi yang melegitimasi kedua hal tadi.
3. Keamanan ekonomi, mencakup akses pada sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahtraan dan kekuatan negara.
4. Keamanan sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional.
5. Keamanan lingkungan, mencakup pemeliharan lingkungan lokan sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusianya (Perwita & Yani 2005:122).

2.1.6 *Cyber Security*

Keamanan komputer atau dalam Bahasa Inggris disebut *Computer Security* atau dikenal juga dengan sebutan *Cyber Security* adalah upaya pengamanan dan pencegahan terhadap perangkat komputer dalam lingkungan *cyber* dengan tujuan untuk menangkal serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut John. D Howard dalam bukunya *An Analysis of Security Insidents of the Internet* menyatakan bahwa :

> "keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab" (Howard 1989-1995).

Sedangkan menurut Gollman dalam bukunya *Computer Security* menyatakan bahwa :

> "keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer" (Gollman : 1999).

Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada computer. sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan, seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer.

Keamanan komputer memberikan persyaratan terhadap komputer yang berbeda dari kebanyakan persyaratan sistem karena sering kali berbentuk pembatasan terhadap apa yang tidak boleh dilakukan oleh komputer. penerapan keamanan computer dalam kehidupan sehari-hari dapat berguna sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.1.7 *Cyber Crime*

Cybercrime didefinisikan sebagai bentuk-bentuk kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat yang digunakan serta sebagai sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. *The U.S. Department of Justice*

memberikan pengertian *computer crime* sebagai: “setiap tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk perbuatan yang, penyidikan, atau penuntutan". Pengertian lainnya diberikan oleh *Organization of European Community Development*, yaitu: "setiap perilaku ilegal, tidak etis atau tidak sah yang berkaitan dengan pengolahan otomatis dan transmisi data" (Suseno, 2012 : 95).

Menurut Arief Mansur dan Elisatris Gultom:

> “Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau *cybercrime* adalah upaya memasuki dan menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang di masuki atau digunakan tersebut” (Mansur dan Gultom, 2005 : 8).

Sedangkan menurut Peter :

> “Definisi kejahatan siber adalah kejahatan yang ditujukan pada komputer atau sistem komputer. Bagaimanapun sifat kejahatan siber akan jauh lebih kompleks seperti yang akan kita lihat nanti, kejahatan siber dapat dengan mudah masuk ke komputer lain tanpa memerlukan izin. Hal ini dapat menimbulkan penyebaran virus, vandalisme, dan mungkin pencurian data, uang, atau informasi sensitif menggunakan sistem komputer” (Peter, 2000 : 56).

Menurut Eoghan Casey *“Cybercrime”* digunakan untuk mengacu pada setiap kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan*,”* beliau mengkategorikan *cybercrime* kedalam 4 kategori yaitu:

1. Komputer dapat menjadi objek kejahatan.
2. Komputer dapat menjadi subjek kejahatan.
3. Komputer dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan atau merencanakan kejahatan.
4. Komputer dapat menjadi simbol untuk mengintimidasi dan menipu (Casey,

2001:16).

Pengertian *cybercrime* yang relatif lebih luas adalah. "*cybercrime* merupakan kegiatan dimana komputer, telepon, peralatan seluler, melanggar hak properti intelektual, melanggar dan masuk kedalam sistem komputer dan jaringan." (Speer, 2003 : 260).

Dalam *cyber space* atau dunia maya terdapat jenis-jenis tindak kejahatan lama dan tindak kejahatan lama. Seperti yang dikutip oleh Sigit dalam buku Yvonne Jewkes yang berpandangan bahwa tindak pidana *cyber* dapat diklasifikasikan dalam dua kategori berikut :

1. *New crimes using new tools*

   Kejahatan yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain atau terhadap tipe korban lain, seperti hacking dan memasukan virus.

2. *Old crimes using new tools.*

   Kejahatan konvensional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan teknologi informasi baru, seperti penipuan, pencurian identitas, dan *stalking* (Suseno, 2012 : 95).

2.2 Kerangka Pemikiran

Keberadaan dunia *cyber* sekarang menjadi urusan dunia internasional dan bukan hanya menjadi urusan domestik suatu Negara lagi, karena pengaruh yang ditimbulkan dapat menimpa siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Organisasi dan aset pengguna dalam *cyber security* termasuk perangkat yang terhubung komputasi,

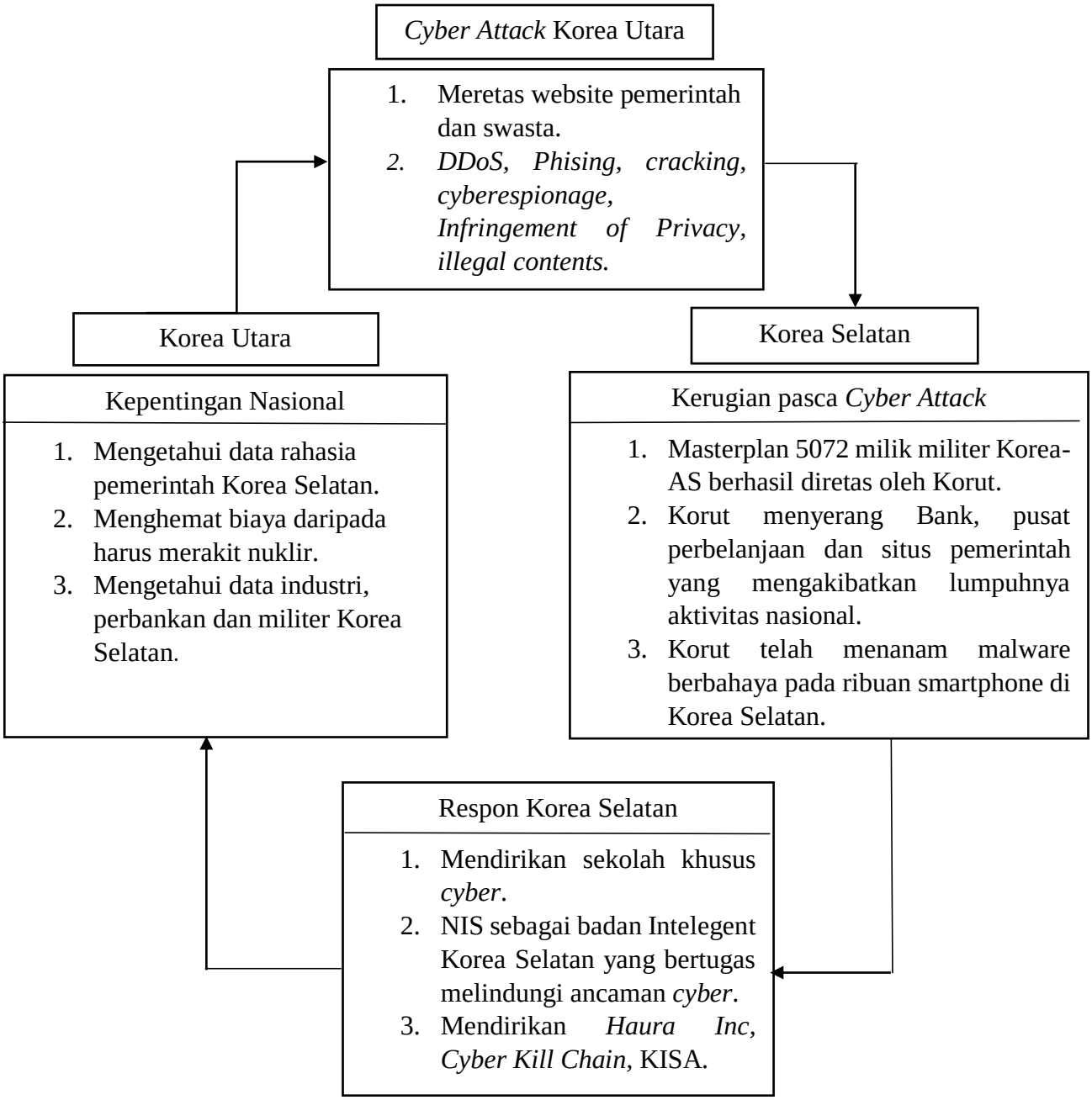
personil, infrastruktur, aplikasi, layanan, sistem telekomunikasi dan totalitas informasi yang dikirimkan dan/atau disimpan dalam lingkungan maya.

Cyber Security merupakan upaya untuk memastikan pencapaian dan pemeliharaan sifat keamanan organisasi dan aset pengguna terhadap risiko keamanan yang relevan dalam lingkungan *cyber*. *Cyber attack* terjadi dalam dua bentuk, pertama untuk menyerang data dan kedua untuk menyerang sistem kontrol (*control system*). Bentuk pertama digunakan untuk mencuri, merusak atau mengubah data, dan *denial of service*. Bentuk kedua berfokus pada kontrol sistem yang digunakan untuk memanipulasi atau melumpuhkan sistem infrastruktur secara fisik. Korea Utara telah melakukan ribuan serangan dunia maya terhadap Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan kerugian kurang lebih senilai 805 juta dolar AS,

Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan belum menemukan jalan damai dalam waktu dekat, Korea Utara telah meningkatkan "tentara digital" nya dalam upaya untuk menghadapi perang *cyber*. Menurut informasi bocoran terbaru dari Kementerian Pertahanan Korea Selatan, unit militer negara ini didedikasikan untuk kegiatan *cyber*, yang sekarang meningkat dua kali lipat dari Korea Selatan. Korea Utara mengerahkan lebih dari 6.000 tentara untuk perang *cyber* dan melakukan serangan *cyber* untuk melumpuhkan fisik dan psikologis ke Korea Selatan sehingga menyebabkan terjadinya masalah dalam operasi militer dan infrastruktur nasional kementerian pertahanan Korea Selatan. Selain institusi militer, serangan dunia maya juga menyasar bank komersial, instansi pemerintah, lembaga penyiaran televisi dan laman media. Korea Selatan dan Korea Utara yang

statusnya masih hangat ditengah isu keamanan di semenanjung Korea, dengan kecepatan internet broadband dan tingkat penetrasi yang tinggi, Korea Selatan termasuk yang tercepat di dunia, Seoul adalah salah satu kota yang paling terhubung dengan internet di dunia. Sebaliknya, Korea Utara memiliki akses internet yang membatasi jumlah penggunanya untuk pertukaran informasi. Akses penuh terhadap internet hanya untuk kaum elit negara itu saja. Maka dari itu Korea Utara yang memiliki kepentingan nasional untuk memajukan ekonominya, untuk pengembangan senjata nuklirnya Korea Utara malah mendapatkan sangsi dari PBB, maka dari itu diperlukan alternatif usaha agar seluruh kepentingan nasionalnya terpenuhi, salah satunya dengan cara *cyber attack*. Untuk mencegah *cyber attack* terulang kembali, Korea Selatan menerapkan kebijakan *cyber security* untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan nasionalnya yang tengah dihadapi dalam beberapa tahun belakangan ini dan penyerangan *cyber* tersebut diduga datangnya dari negara tetangga mereka yaitu Korea Utara.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran